

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perusahaan ialah sebuah badan yang melibatkan pihak-pihak tertentu diantaranya adalah pemegang saham yang memiliki peran sebagai pihak pemberi modal, serta manajemen sebagai pihak yang melakukan kegiatan operasional perusahaan tersebut (Ardani, 2017). Dapat dikatakan juga perusahaan merupakan sebuah organisasi yang menjadi suatu tempat untuk melakukan suatu kegiatan produksi dan merupakan suatu tempat berkumpulnya faktor-faktor produksi dengan tujuan untuk memperoleh laba. Dikutip dari *accurate*, perusahaan berdasarkan lapangan usaha atau kegiatannya dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya: perusahaan jasa, dagang, manufaktur, ekstraktif, dan agraris. Walaupun memiliki jenis kegiatan yang berbeda, sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan keuangan setiap tahunnya. Manajemen perusahaan selaku penyusun laporan keuangan harus memberikan hasil kegiatan operasional dan juga aktivitas keuangan perusahaan yang berkualitas.

Sesuai dengan Pasal 68 ayat 1 UU No. 40 tahun 2017 mengenai Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi suatu perusahaan wajib memberikan laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan kepada seorang akuntan publik untuk diaudit. Yang mana kriterianya adalah sebagai berikut; apabila kegiatan usaha perusahaan adalah mengoperasikan dana masyarakat, perusahaan yang menerbitkan surat pernyataan utang kepada masyarakat, perusahaan termasuk ke dalam kriteria perseroan terbuka, perusahaan dikatakan persero, perusahaan yang memiliki aset atau jumlah peredaran usaha sebanyak minimal Rp50 miliar, dan diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan juga *stakeholders* perusahaan tersebut.

Pelaporan keuangan sebuah entitas akan lebih terpercaya keabsahannya apabila telah diaudit yang dilakukan oleh seorang auditor eksternal dari suatu kantor akuntan publik yang terpercaya. Jasa akuntan publik dengan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kecermatan, kerahasiaan, dan perilaku profesional memiliki peran sebagai pihak eksternal diperlukan untuk

mengaudit laporan keuangan perusahaan. Selain itu auditor diperlukan guna mendeteksi kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan.

Kesalahan-kesalahan yang terdapat di suatu laporan keuangan kemungkinan dapat terjadi karena faktor kesengajaan maupun kelalaian manajemen. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen biasanya dalam bentuk penggelapan dana maupun memanipulasi laporan keuangan untuk menarik investor. Sehingga dalam proses untuk mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan dibutuhkan pihak independen yaitu auditor eksternal.

Dengan laporan keuangan yang sudah diaudit dapat membuat masyarakat akan lebih percaya bahwa pelaporan keuangan, terbukti relevan dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Terlebih untuk sisi *financial statements* perusahaan. Karena hal ini mampu dijadikan dasar pembuatan keputusan bagi pengguna laporan keuangan baik untuk *stakeholders* maupun masyarakat. Laporan keuangan yang telah diaudit dapat memperlihatkan kualitas audit yang nantinya dapat dilihat atau diukur baik atau tidak. Kualitas audit mempunyai peran penting sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan penggunanya dalam hal mengukur kinerja sebuah perusahaan.

Berdasarkan dari ketentuan BPK Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 terkait dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), untuk mengukur kualitas audit maka dapat memanfaatkan tiga cara, yaitu: kualitas proses, kualitas hasil, dan kualitas tindak lanjut hasil audit. Kualitas proses memiliki kaitan dengan akurasi dalam temuan audit, untuk kualitas hasil memiliki kaitan dengan penilaian rekomendasi, tingkat kejelasan suatu laporan, dan juga manfaat audit, sedangkan untuk kualitas tindak lanjut hasil audit berkaitan dengan terwujudnya manfaat pemeriksaan suatu perusahaan yang dilakukan oleh seorang auditor.

Namun sering kali kita temui terdapat beberapa perusahaan yang menyerahkan laporan keuangan dengan hasil kualitas audit secara tidak baik. Kesalahan dari perusahaan yang menghasilkan laporan keuangan yang telah disusun secara tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan maupun auditor yang tidak mampu mengindikasikan adanya kesalahan pada laporan keuangan perusahaan tersebut dapat menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas audit. Bersumber pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang

menjelaskan bahwa seorang auditor dapat dikatakan memiliki kualitas, apabila telah memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Mutu profesional dan independensi auditor yang merupakan bagian dari standar audit dimana standar tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan audit dan menyusun laporan audit.

Terdapat beberapa kasus terdahulu mengenai kinerja seorang auditor yang tidak mampu mengetahui adanya kesalahan material dalam laporan keuangan manajemen perusahaan. Dilansir dari wartaekonomi terdapat kasus dimana perusahaan besar multinasional yaitu British Telecom melakukan *fraud* dalam penyusunan laporan keuangannya. Yang mana pada saat itu PwC merupakan kantor akuntan publik yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut.

Kasus ini diawali pada April 2017 dimana terdapat aktivitas peningkatan laba perusahaan selama beberapa periode dengan cara yang tergolong tidak wajar, hal ini dilakukan oleh manajemen perusahaan melalui kerjasama yang bersifat koruptif dengan perusahaan klien dan jasa keuangan. Sejak tahun 2013, manajemen perusahaan melaporkan penghasilan lebih besar dengan adanya perpanjangan kontrak *invoice* palsu serta transaksi palsu lainnya yang dilakukan dengan *vendor* perusahaan. Diyakini bahwa British Telecom melakukan hal tersebut karena adanya dorongan untuk memperoleh bonus tahunan yang diterima karyawan dari perusahaan tersebut (*tantiem*).

Dampak yang dialami oleh manajemen perusahaan British Telecom karena kasus *fraud* ini diantaranya adalah perusahaan harus memotong proyeksi arus kas selama tahun 2017 sebesar GBP500 juta serta menurunkan GBP530 juta untuk membayar utang yang telah disembunyikan dan tidak dicatat. Dalam kasus ini dinyatakan bahwa British Telecom telah mengalami defisit karena melakukan pembayaran pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tidak terjadi pada perusahaan.

Dampak lainnya juga dialami oleh pemegang saham dan investor pada saat perusahaan tersebut mempublikasikan koreksi pendapatan sebesar GBP530 juta pada bulan Januari 2017. Dimana harga saham British Telecom mengalami penurunan satu per lima. Karena hal tersebut, para pemegang saham British Telecom mengayuhkan desakan kerugian *class-action* terhadap perusahaan karena

menganggap bahwa perusahaan tidak transparansi kepada para investor dan tidak secara cepat mengumumkan *fraud* perusahaan. Terlebih British Telecom melakukan *fraud* tersebut dengan sengaja karena menginginkan bonus tahunan.

Dalam hal ini, diketahui bahwa PwC sebagai kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut, tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh British Telecom. Karena hal ini justru dilaporkan oleh pelapor pengaduan (*whistleblower*). Maka dari itu, perusahaan segera mengganti kantor akuntan publik yang sebelumnya PwC menjadi KPMG. Diketahui juga bahwa British Telecom dengan PwC telah memiliki hubungan selama 33 tahun. Maka dari itu terdapat dugaan bahwa adanya hubungan yang terjalin lama antara kantor akuntan publik terhadap perusahaan kliennya mampu mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP.

Kasus selanjutnya dialami oleh kantor akuntan publik EY Indonesia, dilansir dari *bisnitempo*, dimana pada tahun 2017 KAP EY terkena denda sebesar US\$ 1 juta dari Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat atau dapat disebut sebagai *Public Company Accounting Oversight Board*. EY dikenakan denda karena divonis gagal menjalankan audit laporan keuangan kliennya yaitu Indosat. Vonis tersebut dikarenakan EY memberikan opini dan hasil audit laporan keuangan kliennya tidak disertai bukti yang layak.

Temuan tersebut diawali pada saat KAP yang memiliki mitra dengan EY di AS melakukan peninjauan atas hasil audit KAP yang berada di Indonesia. Dari hasil tinjauan ditemukan bahwa adanya penyewaan sebanyak lebih dari empat ribu unit *tower* selular yang tidak memiliki *backup* data yang tepat dalam laporan audit. Namun dengan demikian KAP EY mempublikasikan laporan hasil audit dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Atas kelalaian tersebut PCAOB memberikan penalti sebesar US\$1 juta dan juga menjatuhkan hukuman kepada dua auditor mitra EY yang berperan serta dalam melakukan audit perusahaan Indosat pada tahun 2011 yang tidak menyertakan bukti audit yang cukup. Maka dari itu EY memperketat pengawasan terhadap auditornya.

Dengan kedua contoh kasus diatas, ditemukan bahwa beberapa perusahaan masih menyajikan laporan keuangan yang mengandung kesalahan material dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut masih belum mampu menghasilkan kualitas

audit yang baik. Permasalahan itupun dapat terjadi karena adanya pengaruh dari tenure audit seperti pada contoh British Telecom yang telah memiliki hubungan dengan PwC selama 33 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ikatan antara KAP dengan perusahaan dapat mempengaruhi kualitas audit.

Tidak adanya rotasi audit juga dapat menurunkan kualitas audit meskipun perusahaan menggunakan jasa audit eksternal. Sumarwoto (2006) dalam jurnal Kirana (2020) menjelaskan suatu pergantian atau pertukaran akuntan publik atau auditor dan kantor akuntan publik yang mana hal tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu yang terjadi sesuai dengan peraturan pemerintah atau karena inisiatif dari perusahaan klien disebut sebagai rotasi audit. Dalam penjelasan ketiga kasus diatas hal tersebut dapat terjadi karena lamanya penugasan auditor pada perusahaan yang mengakibatkan kedekatan hubungan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan sehingga dapat mengurangi independensi seorang auditor yang dapat menurunkan kualitas audit perusahaan.

Pembaharuan dari penelitian ini adalah dimana menggunakan proksi *earnings surprise benchmark* untuk menilai kualitas audit pada sampel perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Dimana Priyanti (2019) menjelaskan bahwa pengukuran kualitas audit menggunakan opini *going concern* dan ukuran KAP belum akurat.

Melihat dari permasalahan kasus kegagalan audit yang telah dijelaskan diatas, dimana besarnya ukuran suatu KAP juga belum tentu membuktikan bahwa KAP yang besar memiliki kualitas audit yang tinggi. Maka dari itu, berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya penelitian ini akan mengangkat judul yaitu **“Pengaruh Tenure Audit, Rotasi Audit, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit”**.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tenure audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah rotasi audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?

3. Apakah ukuran kantor akuntan publik memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, berikut merupakan tujuan penelitian yang ini dicapai:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami secara empiris pengaruh tenure audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami secara empiris pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami secara empiris pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit.

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Riset ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat serta sebagai dasar pertimbangan kepada beberapa pihak yang memerlukan, diantaranya adalah:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literatur yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan topik faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu mengenai audit khususnya pada kualitas audit.

b. Aspek Praktis

1. Untuk perusahaan, riset ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat kepada manajemen perusahaan berkaitan dengan pentingnya kualitas audit dan dampaknya bagi perusahaan.
2. Untuk investor dan kreditor, riset ini mampu memberikan penjelasan terkait pentingnya mengetahui kondisi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan di masa depan.
3. Untuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik, riset ini diharapkan mampu memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan

pentingnya penilaian potensi keberlangsungan suatu perusahaan melalui kualitas audit.